

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN

Sayifullah¹, Tia Ratu Gandasari²

¹Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: sayifullah@untirta.ac.id

² Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: tia.ratu@yahoo.co.id

ABSTRACT

Poverty is a problem faced by all of countries in the world, especially in the developing countries, such as Indonesia. Poverty is a complex problem influenced by many interrelated factors, including income levels, unemployment, health, education, access to goods and services, location, geography, gender, and environment. Poverty in Banten Province is relatively higher than other provinces in Indonesia, although Banten not included among the ten poorest regions in Indonesia. This study purpose is to analyze how and how much the influence of Human Development Index and Unemployment to Poverty in Banten Province during the period of 2008 to 2012. This study uses multiple regression analysis with panel data as the analysis method. This study focuses on six regencies and municipalities in Banten Province as cross-section data and time duration between 2008 to 2012 as time series data. The study results show that simultaneously, there is influence of the variable of Human Development Index (HDI) and Unemployment variable to Poverty. Then, partially, the variable of Human Development Index (HDI) show has positive and significant influence to poverty variable, whereas the variable of unemployment show insignificant influence to poverty variable in Banten Province. In addition, the determinant coefficient shows 0.96.

Keywords: *Poverty, the Human Development Index (HDI) and Unemployment*

ABSTRAK

Kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama di negara berkembang. Kemiskinan adalah suatu permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait, termasuk tingkat pendapatan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses pada barang dan jasa, lokasi, geografi, gender, dan lingkungan. Kemiskinan di Provinsi Banten masih relatif lebih tinggi daripada provinsi lain di Indonesia, meskipun Provinsi Banten tidak termasuk antara sepuluh dari daerah termiskin di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dan berapa besar pengaruh Indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi banten dalam kurun waktu 2008 sampai 2012. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan panel data sebagai metode analisis. Penelitian ini fokus pada enam kabupaten dan kota di Provinsi Banten sebagai data cross-section dan rentang waktu antara 2008 sampai 2012 sebagai data

runtut waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh antara variabel indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan. Kemudian secara parsial, variabel indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi menunjukkan 0.96.

Kata kunci: Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran

2.2 PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bidang pembangunan nasional dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat, dilihat dari aspek ekonominya dapat diukur dengan pendapatan nasional perkapita. Peningkatan pendapatan nasional terjadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif yang diukur dengan naiknya PDB (produk domestik bruto) dari tahun ketahun. Pertumbuhan PDB menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dicapai dalam pembangunan ekonomi, oleh karena itu tidak mengherankan jika dibanyak negara pada awal pembangunan ekonomi lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pembangunan ekonomi maka dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi begitu juga sebaliknya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka dapat memperlancar pembangunan ekonomi (Hidayat, 2013).

Pembangunan ekonomi memiliki tiga indikator pokok, yaitu : (1) Indikator moneter, yaitu indikator yang berhubungan dengan uang, uang disini berupa tingkat income yang diterima oleh masyarakat. Dalam indikator moneter ini indikator yang dapat diukur adalah pendapatan per kapita, karena pendapatan per kapita seringkali digunakan pula sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara sedang berkembang (NSB). Dengan kata lain pendapatan per kapita selain bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara juga dapat menggambarkan perubahan corak tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara. (2) Indikator non-moneter, indikator ini merupakan indikator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Indikator ini memiliki beberapa macam sub indikator yaitu, (a) indikator sosial, yaitu membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara untuk membandingkan tingkat kesejahteraan, (b) indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia, yaitu untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, (3) Indikator campuran, indikator ini disebut campuran karena merupakan campuran dari indikator sosial dan indikator ekonomi yaitu, pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata dan akses media masa. Indikator-indikator diatas memiliki masalah yang paling mendasar yaitu pendapatan per kapita, indeks

pembangunan manusia, angkatan kerja yang semakin meningkat dan tingkat kemiskinan, semua hal ini dapat terselesaikan jika pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan baik (Lincoln Arsyad, 2004:25).

Dalam konteks pembangunan ekonomi di suatu daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah. Hal ini menandakan bahwa IPM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah. IPM yang merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap

kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah (Kurnia Lismawati, 2007).

Sejak dilaksanakan pembangunan di Indonesia, jumlah penduduk miskin selama periode (1976-1996) telah mengalami penurunan secara drastis. Sebagai ilustrasi, selama periode (1976-1981) kemiskinan turun dari 54,2 juta jiwa menjadi 40,6 juta jiwa (13,6%), pada tahun 1990 turun lagi menjadi 27,2 juta jiwa (13,4%), pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin tinggal 22,5 juta jiwa atau (4,7%). Di Indonesia, penelitian jumlah orang miskin, oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas atau garis miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan dipakai patokan 2100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Komponen pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Banten, ternyata tidak lepas dari kemiskinan, Provinsi muda ini mempunyai masalah kemiskinan yang cukup kompleks. Meskipun rata-rata kemiskinan di Banten sebesar 5.71% lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu sebesar 11.6% pada tahun 2012, tetapi tidak meratanya pembangunan serta kemiskinan dimana- mana menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Banten. Berikut ini adalah gambaran umum penduduk miskin menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Banten. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten setiap tahunnya semakin menurun sekitar 1% - 2 % pertahunnya secara keseluruhan, namun demikian pada kenyataannya penduduk miskin di Provinsi Banten ini semakin terlihat dari tahun ke tahunnya terutama Banten bagian selatan. Kemiskinan yang tersebar di daerah-daerah selatan Provinsi Banten seperti Kabupaten Lebak, Pandeglang maupun daerah Kabupaten Tangerang mendeskripsikan bahwa minimnya peran pemerintah daerah Provinsi Banten dalam mereduksi kemiskinan, ditambah lagi dengan rendahnya komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam

merancang kegiatan pendekatan pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan untuk berpihak kepada masyarakat miskin (proopoor) yang didasari oleh pemahaman akan kemiskinan yang multidimensional.

Kondisi kemiskinan di Provinsi Banten ini kerap kali menjadi sorotan pemerintah pusat dan bahkan mancanegara, dengan keindahan dan kealamian alamnya serta sumber daya alamnya yang melimpah ternyata tidak mengurangi angka kemiskinan yang ada. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab terkait peningkatan jumlah dan presentase penduduk miskin terus melonjak, penyebab yang dimaksud adalah, faktor laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan pendapatan riil warganya, inflasi umum relatif tinggi, upah buruh konstruksi secara riil turun, upah riil pembantu rumah tangga juga turun dan melambatnya perekonomian.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar), pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar sembilan tahun, dan angka putus sekolah), dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Pertumbuhan penduduk miskin di Banten mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ketahunnya. Pada tahun 1961- 1971 pertumbuhan penduduk miskin di Banten sebesar 2.25%, kemudian pada tahun 1971-1980 naik menjadi 3.12%, pada tahun 1980-1990 naik lagi menjadi 4.04%, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 1990-2002 pertumbuhan penduduk miskin di Banten mulai mengalami penurunan menjadi 3.10%, kemudian pada tahun 2002-2010 turun lagi menjadi 2.78%, pada tahun 2010-2011 turun menjadi 2.23%, dan pada tahun 2011-2012 masih turun menjadi 2.16%. Penyebab-penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious cyrcle of poverty*). Teori lingkaran setan kemiskinan mula- mula dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi asal Swedia dan penerima hadiah nobel untuk ekonomi, Ragnar Nurkse. Teori ini menjelaskan sebab-sebab kemiskinan di negara-negara sedang berkembang yang umumnya baru merdeka dari penjajahan asing. Pada pokoknya teori ini mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Karena rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan

adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat. Untuk bisa membangun kesejahteraan yang lebih baik, maka lingkaran setan itu harus diputus, yaitu pada titik lingkaran rendahnya produktivitas, sebagai sebab awal dan pokok. Caranya adalah dengan memberi modal kepada pelaku ekonomi.

Akar masalah kemiskinan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut : pertama, karena miskin, seseorang pasti memiliki pendapatan yang kecil. Karena pendapatannya kecil, daya beli informasi dan pengetahuannya rendah. Daya beli pengetahuan dan informasi yang rendah ini, akan menyebabkan si miskin tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang kurang, akan menyebabkan produktivitas seseorang menjadi kecil. Karena produktivitasnya yang kecil, akan menyebabkan jatuh miskin lagi. Kedua, karena miskin, seseorang pasti hanya akan memiliki tabungan yang kecil. Karena memiliki tabungan yang kecil, akan membuat kepemilikan modal seseorang menjadi rendah yang akan mengakibatkan produksinya rendah serta pendapatannya kecil. Karena pendapatannya kecil, akan menyebabkan jatuh miskin lagi. Ketiga, karena miskin, seseorang pasti hanya akan memiliki kemampuan konsumsi yang rendah. Kemampuan konsumsi yang rendah akan membuat seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan, sandang, dan pangannya secara layak. Hal ini juga akan berdampak pada buruknya status gizi seseorang. Seseorang dengan status gizi yang buruk hanya akan memiliki produktivitas kerja yang buruk akan menyebabkan produksinya menjadi rendah, sehingga akan menyebabkan jatuh miskin lagi. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk juga masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih kurang memadai. Makna dari lingkaran setan kemiskinan tersebut adalah keharusan semua pihak terutama pemerintah untuk memiliki keinginan yang kuat untuk memutus alur tersebut. Lingkaran itu tidak akan pernah terpotong apabila tidak ada satu bagian saja yang dihilangkan.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit atau gabungan dari beberapa indikator yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995 : 12). Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep tersebut, yakni konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk secara fisik, mental maupun spiritual (Mohammad Bhakti Setiawan dan Abdul Hakim, 2003).

Indeks Pembangunan Manusia boleh dikatakan sebagai pengukur kesejahteraan yang telah disempurnakan. Dan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB per kapitanya. Dimana PDRB adalah jumlah tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah adalah tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Selain faktor Indeks Pembangunan Manusia, adapula indikator lain yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yaitu seberapa besar jumlah pengangguran yang ada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tersebut. Karena pengangguran merupakan masalah kependudukan yang yang berhubungan erat dengan kemiskinan. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi setiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan masyarakat. Bahkan, masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah-masalah baru di bidang ekonomi maupun non-ekonomi.

Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan. Meningkatnya jumlah usia produktif juga menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah pengangguran di Banten. Jumlah angka pengangguran di Provinsi Banten

periode Februari 2012 menempati urutan tertinggi dibandingkan Provinsi lain di Indonesia, yaitu mencapai 12,52% dari jumlah penduduk di Provinsi Banten. Pengangguran didominasi oleh warga pribumi bukan pendatang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN) tentang tenaga kerja pada february 2012, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten di atas DKI Jakarta yaitu mencapai 12,52%, sedangkan DKI Jakarta 10,72% dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Walaupun angka Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten mengalami penurunan dari 14,76% menjadi 12,52% pada february 2012, namun angka pengangguran di Provinsi Banten masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 6,32%, dan pengangguran tertinggi di Indonesia adalah di Provinsi Banten.

2.2.1 Tinjauan Literatur

Kemiskinan

Kemiskinan adalah awal dan akhir dari suatu proses kemelaratan masyarakat. Bersama-sama faktor-faktor kelemahan jasmani, kerawanan, ketidakberdayaan dan isolasi, serta kemiskinan membuat masyarakat terjebak dan sulit keluar dari sindrom kemiskinan. Semua orang dimanapun berada pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata miskin dan kemiskinan, namun mereka enggan menelaah lebih jauh apa sebenarnya arti dari kemiskinan tersebut dan apa sebabnya seseorang dapat dikatakan miskin.

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Sedangkan BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial.

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas

terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006: 95). Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan. (Syahyuti, 2006: 95). Bagi pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilakukan bila institusi-institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok-kelompok swadaya, maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan.

Paradigma neo-liberal ini digerakan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigma ini (Suharto, 2002). Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional (GNP), yang sejak tahun 1950-an mulai dijadikan indikator pembangunan. Para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan ini saat mengkaji masalah kemiskinan suatu Negara. Pengukuran

kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif income poverty yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator garis kemiskinan (Edi Suharto, 2009). Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandangi kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam permasalahan kemiskinan. Hal ini mengakibatkan bentuk-bentuk kemiskinan yang muncul dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Bentuk-bentuk kemiskinan yang tidak dapat ditangkap oleh paradigma ini terutama bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Akibatnya akar permasalahan yang menjadi penyebab kemiskinan juga tidak dapat ditemukan. Namun memang pendekatan income poverty ini lebih mudah dilihat dan dikaji karena langsung dapat terukur, serta sasaran pada perbaikan ditingkat individu langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.

Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu PDRB dalam konteks nasional dan PDRB dalam konteks regional, hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Untuk itu dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif, yang mampu menangkap tidak saja perkembangan

ekonomi akan tetapi juga perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia. Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi. Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. Sedangkan menurut (Tulus, 2003:167) IPM atau dikenal dengan sebutan Human Development Index (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposit yang didasarkan pada tiga indikator, yakni (a) kesehatan, (b) pendidikan yang dicapai, dan (c) standar kehidupan.

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya: 1) Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih, 2) Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana, 3) Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar, 4) Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini : 1) Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup, 2) Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi, 3) Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP).

Tingkat Pengangguran

Menurut BPS (2001), Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Sedangkan definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam jangka waktu tertentu (usia angkatan kerja) yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian aktif dalam mencari kerja. Sedangkan dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksud dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Sedangkan menurut Kuncoro (2013 : 64), pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya

dikategorikan sebagai bekerja) dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (jobless). Pengangguran dengan konsep atau definisi seperti ini biasanya disebut dengan pengangguran terbuka (open unemployment).

Berikut ini adalah jenis-jenis pengangguran menurut faktor penyebabnya:

1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian.

4. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran kerja.

Pengangguran juga dibagi kedalam lima Bentuk, yaitu :

1. Pengangguran terbuka : baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).
2. Setengah menganggur (underemployment): yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka biasa kerjakan.
3. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh: yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.
4. Tenaga kerja yang lemah (impaired): yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakitan.

5. Tenaga kerja yang tidak produktif : yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi karena sumber daya-sumber daya penolong kurang memadai maka mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

2.2.2 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga komponen yang berhubungan dengan tingkat produktifitas masyarakatnya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, produktifitas masyarakat akan meningkat dan akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberika gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M dalam Purriyanti Septina Franciari, 2012).

Todaro (2003) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan tujuan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk membangun kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Yani Mulyaningsih (2008), indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (longevity), dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumber daya yang bisa

memenuhi standar hidup. Artinya tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Apriliyah S. Napitupulu (2007), mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun, salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka (Prima Sukmaraga, 2011).

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai oleh seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Lincoln Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang

bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat kependidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.

2.3 METODE PENELITIAN

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) ataupun publikasi lainnya. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2008-2012 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Presentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten tahun 2008 - 2012
2. Data Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya di Provinsi Banten tahun 2008-2012
3. Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten tahun 2008-2012

Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*). Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu. Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i; i = 1, 2, \dots, N \quad (1)$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

X = variabel bebas

i = jumlah data

N = banyaknya data cross section

$\beta_0 \beta_1$ = koefisien regresi

Sedangkan persamaan model dengan time series adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t; t = 1, 2, \dots, T \quad (2)$$

Keterangan :

t = jumlah waktu

T = banyaknya data time series

Karena data panel merupakan gabungan dari data time series dan cross section, maka model dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}; \quad (3)$$
$$i = 1, 2, \dots, N \text{ dan } t = 1, 2, \dots, T$$

Keterangan :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

X_{it} = variabel bebas untuk data ke- i dan waktu ke- t

ε_{it} = gabungan error term

$N \times T$ = banyaknya data panel

Persamaan ekonometrika dari model di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = \beta_0 + \beta_1 \text{IPM} + \beta_2 \text{Pengangguran} + \mu_t \quad (4)$$

Keterangan :

Kemiskinan = Kemiskinan

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Pengangguran = Pengangguran

2.4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian dari variabel penelitian yang ditetapkan, maka diperoleh nilai koefisien sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 106.9057 - 1.390841\text{IPM} - 0.037614\text{Pengangguran}$$

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, secara parsial masing-masing variabel independen yakni indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan untuk hasil pengujian secara serentak atau simultan, variabel independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2008-2012.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan

Dari hasil regresi ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap output total pada 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan pada 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0.96 (96 persen). Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.

Dari hasil regresi ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Dari hasil regresi ditemukan bahwa Pengangguran memberikan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan 6 Kabupaten/Kota di

Provinsi Banten. Kenaikan Pengangguran sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.04 persen namun hasil ini tidak signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap kemiskinan tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan.

Dari hasil regresi ditemukan bahwa Pengangguran memberikan pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini sependapat dengan pendapat Whisnu Adhi Saputra (2011), yaitu karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat kategori pengangguran terbuka diatas bahwa sebagian diantaranya ada yang masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Selain itu pastilah juga ada yang berusaha atau mempersiapkan usaha sendiri, ada juga yang sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang mempunyai pekerjaan paruh waktu (Part Time) namun dengan penghasilan melebihi orang bekerja secara normal, dan yang mana semua golongan tersebut masuk dalam kategori pengangguran terbuka.

2.5 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Menurunnya kemiskinan saat IPM meningkat merupakan indikasi bahwa peningkatan IPM merupakan indikasi tingginya kualitas sumber daya manusia yang akan berakibat pada meningkatnya produktivitas tenaga kerja penduduk yang akan meningkatkan perolehan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat akan menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Artinya pada saat pengangguran meningkat atau menurun maka relatif tidak ada perubahan yang terjadi pada kemiskinan di Provinsi Banten.

Saran

1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten ini mengidentifikasi faktor kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat perlu ditingkatkan, pemerintah Provinsi Banten juga dapat memberikan pelayanan khusus pada bidang pendidikan secara gratis dan cuma-cuma khususnya bagi masyarakat miskin. Sehingga kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten ini akan meningkat dan lebih baik yang diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Perhatian pemerintah terhadap bidang kesehatan juga tidak bisa diabaikan, perlu ada peningkatan dengan pelayanan-pelayanan kesehatan gratis, memperbanyak puskesmas di Provinsi Banten khususnya di desa yang tergolong miskin dan tertinggal seperti Banten bagian selatan.
2. Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberlakukan kebijakan secara global, seperti misalnya kemudahan pada masyarakat untuk memperoleh dana kredit, mengakses layanan publik, membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten juga harus lebih banyak lagi melakukan perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru yang bersifat padat karya serta menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industri.

2.6 REFERENSI

Andaiyani. 2012, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Operasional terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten.Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Tanjungpura, Kalimantan Barat.

Arianti, Nyayu Neti, et al. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Regional di Kota Bengkulu, Bengkulu 2006.

Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : Penerbit Aditya Media.

Astika, Ketut Sudhana. 2010. Budaya Kemiskinan di Masyarakat : Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Kesadaran Budaya Miskin di masyarakat, Universitas Udayana Bali, Vol.1 No.01.

Cholili, Fatkhul Mufid. 2014. Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia), Universitas Brawijaya Malang.

Fahmi, Fahrizal. 2012, Teori Lingkaran Setan Kemiskinan. From Fahrizal fahmi.blogspot.com.

Gujarati, Damodar. 2003. Basic Econometri, Penerbit : Mc.Graw-Hill/Irvin. Hidayat, January A.J. Juni 2013, Analisis Struktur Perekonomian di Kota Manado, Universitas Samaratulangi Manado, Vol.1 No.3.

Jonaidi, Arius. April 2012, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia, Kabupaten Agam, Vol.1, No.1.

Kuplale, SP, MSC, Raihan. oktober 2012, Faktor – Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kota Ambon, Agrilan, Volume 1 No.1.

Maryani, Sri. November 2009, Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, Pekanbaru, Vol.1, No.3.

Mubbarak, Moch Miftachul. 2011, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Buta Huruf dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, Jakarta.

Napitupulu, A.S. 2007. Pengaruh Indikator Komposit IPM Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara. Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara.

Putri, LA Septyana Mega., Ni Nyoman Yuliarni. oktober 2013, Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali, Universitas Udayana, Volume 2, No.10.

Rejo, Sinamo (2013). Lingkaran Setan Kemiskinan Indonesia. From Pakpakposblogspot.com/2013/04/lingkaran-setan-kemiskinan-indonesia.html.

Ryzmelinda (2012). Pengertian Kemiskinan Menurut Beberapa Ahli. From Ryzmelinda-ryzmelinda.blogspot.com/2012/04/pengertian-kemiskinan-menurut-beberapa.html.

Saputra, Wisnu Adi. 2011, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah, FE UNDIP-Semarang.

Setiawan, Mohammad Bhakti, Abdul Hakim. April 2013, Indeks Pembangunan Manusia, Universitas Islam Indonesia, Volume 9, Nomor 1.

Statistik Website. April 2012, PDRB Perkapita Provinsi Banten, From banten.bps.go.id.

Statistik Website. April 2012, PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan 2000, From banten.bps.go.id.

Statistik Website. April 2012, Pertumbuhan Penduduk Miskin di Banten, From banten.bps.go.id

Statistik Website. April 2012, Presentase Penduduk Miskin di Banten, From banten.bps.go.id.

Suharto, Edi. 2002, Mengembangkan Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Mengkaji dan Menangani Kemiskinan. IPB Bogor.

Sukirno. Sadono. 2000. Teori Pengantar Makroekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukmaraga, Prima. 2011, Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per kapita dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah. FE UNDIP-Semarang.

Syahbani, Wahid. 2012, Kemiskinan dan Pengangguran. Jakarta.

Syahyuti. 2006, 30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta : PT Bina Rariwana.

Todaro, Michael P, Stephen C Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Widarjono, Ph.D, Agus. 2013, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Keempat*. Yogyakarta : Penerbit UPP STIM YKPN.

Wiguna, Van Indra. Agustus 2013, *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*, Universitas Brawijaya.

Wijayanto, Ravi Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*.Undip-Semarang.

Yacoub, Yarlina. oktober 2012, *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Povinsi Kalimantan Barat*, Volume 8, Nomor.3.